

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Menurut PSAK No. 1 (Revisi 2015) “Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”. Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (SAK 2018). Laporan keuangan merupakan bentuk tanggung jawab entitas terhadap pemangku kepentingan mengenai laporan pengelolaan aktiva yang digunakan untuk menunjang kegiatan perusahaan. Pengguna laporan keuangan maupun para pemangku kepentingan perusahaan wajib mendapatkan informasi mengenai laporan keuangan yang akurat dan terpercaya. Sehingga pihak berkepentingan memiliki keyakinan saat memberikan keputusan untuk keberlanjutan perusahaan. Dalam memperoleh keakuratan atas laporan keuangan entitas dibutuhkan penilaian terhadap akun-akun yang disajikan.

Keadaan tersebut menimbulkan kebutuhan entitas akan pihak ketiga dari luar perusahaan yang bersifat independen dan bertanggung jawab. Pihak ini yang dipercaya oleh entitas maupun pihak berkepentingan yaitu Akuntan Publik merupakan seseorang yang telah mendapatkan izin untuk memberikan jasanya. Auditor ditugaskan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengerjakan proses audit atas laporan keuangan suatu entitas, dengan menguji pernyataan manajer dalam laporan keuangan. Pernyataan tersebut ada lima yaitu asersi atas keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian dan alokasi, serta asersi penyajian & pengungkapan.

Perusahaan dengan ukuran besar atau perusahaan yang sudah *go public* cenderung kian banyak mengungkapkan informasi terkait keuangan serta non-keuangan dibanding dengan perusahaan kecil. Saat tingkat profitabilitas perusahaan meningkat, manajemen cenderung akan membuka informasi yang cukup banyak mengenai kinerja perusahaan. Pengungkapan informasi yang dilakukan

**Prita Mahar Kakalih, 2020**

**PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, DAN SUBSIDIARIES TERHADAP AUDIT FEE (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI Tahun 2015-2018)**

UPN Veteran Jakarta, Ekonomi dan Bisnis, Sarjana Akuntansi

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) - [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

mempengaruhi lamanya proses audit. Salah satu kondisi yang terjadi PT. Siantar Top Tbk. Mempunyai rasio profitabilitas pada tahun 2017 sebesar 9.22% dan *fee* yang dikeluarkan sebesar Rp.2.601.503.928. Namun pada tahun 2018 rasio profitabilitas meningkat menjadi 9.69% dan memberikan *fee* kepada akuntan publik sebesar Rp. 2.213.283.216. Kondisi ini menggambarkan perusahaan memiliki profitabilitas meningkat yang mengakibatkan pekerjaan audit menjadi lebih kompleks seharusnya menambah *fee* audit yang diterima, namun pada tahun 2018 mengalami penurunan *fee* audit sebesar Rp. 388.220.712.

Kasus lain pada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP *Finance*). Dalam kasus ini Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) menjelaskan bahwa akuntan publik mengaudit laporan keuangan SNP *Finance* tahun 2012-2016 tidak menggunakan sistem pengendalian mutu secara penuh atas informasi nasabah dan akurasi jurnal piutang. Hal ini diperkuat sejak tahun 2016, SNP *Finance* menunjukkan tanda-tanda kesulitan keuangan yang puncaknya saat mengajukan permohonan PKPU ke pengadilan niaga. Namun opini yang dikeluarkan oleh akuntan publik dalam kasus ini yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP) ([www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)).

Kasus ini terjadi setelah laporan audit keluar. Perusahaan memiliki tingkat kegagalan keuangan yang tinggi berpengaruh terhadap risiko audit juga meningkat. Dengan kondisi seperti ini, menurut Arens (2017, hlm. 209) auditor harus menurunkan risiko audit yang diterima (*Acceptable Audit Risk* atau AAR) dan meningkatkan jumlah bukti. Hal tersebut mengakibatkan pekerjaan audit menjadi lebih kompleks seharusnya menambah *fee* audit yang diterima akuntan publik.

*Audit fee* merupakan *fee* yang diberikan klien kepada Akuntan Publik sehubungan pemberian jasa audit. Hal ini didukung oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengeluarkan kebijakan penetapan *audit fee* tahun 2008 yang diatur oleh SK No. KEP.024/IAPI/VII/2008. Surat keputusan menjelaskan akuntan publik mendapatkan imbalan sesuai jasa yang diberikan auditor terhadap klien. SK *fee* audit 2008 sebenarnya sudah memadai terkait penetapan *fee* audit. Pada tahun 2015 SK *fee* audit 2008 dianggap dapat merusak citra profesi akuntan publik.

Sehingga tahun 2016 Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah menetapkan peraturan imbalan jasa audit atas laporan keuangan. IAPI merupakan lembaga yang menaungi para profesi akuntan publik di Indonesia. Penetapan imbalan kerja auditor dalam Peraturan Pengurus IAI No.2 Tahun 2016 menggunakan indikator *minimum fee* jasa per jam. Seperti *senior* auditor yang wilayahnya di JABODETABEK imbalan *minimumnya* Rp. 100.000 sedangkan *junior* auditor di luar JABODETABEK imbalan *minimumnya* Rp. 70.000. Imbalan atas jasa yang diberikan perusahaan kepada akuntan publik tercatat dalam surat perikatan. Proses penetapan *fee* dimulai dari mengajukan estimasi *fee* audit oleh akuntan publik kepada perusahaan. Jika perusahaan tidak setuju dengan estimasi, perusahaan diperbolehkan bernegosiasi hingga menyampai kesepakatan.

Peraturan Pengurus IAI No.2 Tahun 2016 hanya mengimbalkan jasa per jam tidak ada imbalan yang pasti untuk satu kali penugasan. Kompleksitas audit merupakan banyaknya tugas yang dilakukan auditor dalam menjalankan prosedur audit. Dan besaran *audit fee* merupakan jumlah *audit fee* yang diterima Akuntan Publik untuk jasanya. Jika auditor memberikan jasa audit atas laporan keuangan memiliki tingkat kompleksitas audit yang tinggi, maka besaran *audit fee* yang diterima juga besar karena imbalan yang diberikan berpatokan dengan batas bawah imbalan jasa per jam.

Faktor dalam menentukan *audit fee* dipengaruhi oleh faktor perbedaan kondisi dan karakter dari perusahaannya. Seperti *auditor attributes* dan *clients attributes*. *Auditor attributes* yaitu reputasi auditor, audit delay dan ukuran KAP berpengaruh terhadap audit fee (Chandra, 2015). *Clients attributes* yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan Dewan komisaris, ukuran perusahaan, komite audit, kompleksitas perusahaan dan keberadaan anak perusahaan berpengaruh terhadap *audit fee* (Oktavia & Ningsih, 2020). Hal ini lah yang membuat peneliti ingin meneliti *audit fee*, karena peneliti ingin membuktikan indikator yang mempengaruhi penetapan audit fee.

Penetapan *fee* audit pihak perusahaan melihat kondisi keuangan perusahaan sedang mengalami keuntungan atau kerugian. Karena profitabilitas perusahaan merupakan gambaran perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas

**Prita Mahar Kakalih, 2020**

**PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, DAN SUBSIDIARIES TERHADAP AUDIT FEE (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI Tahun 2015-2018)**

UPN Veteran Jakarta, Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi [www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) –  
[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) - [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)

dianggap meningkat saat adanya peningkatan sumber dana dalam kegiatan perusahaan. Jika profitabilitas perusahaan meningkat maka prosedur audit yang dijalankan Akuntan Publik semakin kompleks sehingga berpengaruh terhadap *audit fee* yang diterima.

Hal tersebut didukung oleh kasus di PT. Pelangi Indah Canindo Tbk. yang memiliki rasio keuangan tahun 2016 sebesar 2.15% dan tahun 2017 memiliki rasio keuangan meningkat menjadi sebesar 2.79%. Tetapi PT. Pelangi Indah Canindo Tbk. membayar *audit fee* pada tahun 2016 sebesar Rp. 641.890.909 sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp.305.727.272. Sehingga pada tahun 2017 ke 2018 pembayaran *audit fee* menurut sebesar Rp.336.163.637.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Hasan (2017) menyatakan profitabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap *audit fee*. Pernyataan Hasan (2017) dalam penelitiannya terkait profitabilitas berpengaruh terhadap *audit fee* didukung oleh Huri & Syofyan (2019) juga menyatakan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *audit fee*. Jika profitabilitas berpengaruh terhadap *audit fee* artinya laba yang dihasilkan oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis membuat manajemen dapat menerima estimasi imbalan audit yang diberikan. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Sanusi & Purwanto (2017) menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit fee*. Hal ini didukung oleh Oktavia & Ningsih (2020) juga menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit fee*.

Faktor lain yang dapat menetapkan *audit fee* yaitu ukuran perusahaan. Perusahaan yang memiliki total asset lebih dari Rp.10.000.000.000 dapat digolongkan sebagai berisan besar. Jika ukuran perusahaan semakin besar, maka semakin besar jumlah asset yang dimiliki perusahaan yang nantinya berpengaruh terhadap *audit fee*. Seperti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Shafira & Ghozali (2017) menyatakan ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit fee*. Penelitian ini di dukung oleh Pertiwi (2019) juga menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit fee*. Jika ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *audit fee*, artinya perusahaan yang

memiliki total asset tinggi mampu memberikan *audit fee* sesuai dengan jasa yang diberikan. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sanusi & Purwanto (2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan

Faktor lain yang dapat menetapkan *audit fee* yaitu *subsidiaries*. Perusahaan yang kegiatan ekonominya meningkat akan mempunyai peluang untuk memperluas usahanya dengan membuat anak perusahaan (*subsidiaries*). Dengan begitu transaksi antar induk perusahaan dan anak perusahaan (*subsidiaries*) harus di konsolidasikan dalam satu laporan keuangan. Jika jumlah anak perusahaan cukup banyak maka proses audit menambah kompleks sehingga memiliki pengaruh terhadap *audit fee* yang diterima.

Adapun penelitian sebelumnya dilakukan oleh Chandra (2015) menyatakan anak perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit fee*. Hal ini didukung oleh Nurdjanti & Pramesti (2018) juga menyatakan *subsidiaries* (anak perusahaan) memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit fee*. Jika *subsidiaries* berpengaruh terhadap audit fee artinya manajemen mengerti bahwa proses audit menjadi kompleks sehingga manajemen akan mencari Kantor Akuntan Publik yang kapasitasnya tinggi. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rusmanto & Waworuntu (2015) menyatakan *subsidiaries* tidak memiliki pengaruh terhadap *audit fee*.

Berdasarkan latar belakang masalah disimpulkan bahwa ditemukan fenomena riset dan *gap research* diatas masih menunjukkan adanya hasil penelitian yang belum konsisten. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan audit fee dengan menggunakan sampel Perusahaan Manufaktur yang *listed* di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2018.

Perusahaan manufukatur dipilih karena memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan perusahaan terdaftar pada *Indonesia Sharia Stock Index* (ISSI) yang berfokus pada perusahaan yang menjalankan keuangan Syariah. Berdasarkan penjabaran diatas, sehingga peneliti mengambil judul “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaaa, dan *Subsidiaries* terhadap *Audit*

*Fee*” di Perusahaan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2018.

## **I.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dikemukakan tersebut di atas, maka rumusan masalah yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu:

- a. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Audit Fee*?
- b. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Audit Fee*?
- c. Apakah *Subsidiaries* berpengaruh terhadap *Audit Fee*?

## **I.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh Profitabilitas terhadap *Audit Fee*.
- b. Menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Fee*.
- c. Menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh *Subsidiaries* terhadap *Audit Fee*.

## **I.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan subsidaries terhadap audit fee dapat menjadi referensi bagi pihak yang akan melakukan penelitian tentang kinerja audit serta dapat memberikan wawasan tambahan kepada pembaca mengenai kinerja audit.

## b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan perusahaan dalam menetapkan imbalan jasa audit atas laporan keuangan yang dibayarkan kepada Kantor Akuntan Publik. Supaya jumlah imbalan yang dikeluarkan oleh perusahaan sesuai dengan beban yang dikerjakan oleh auditor.

### 2. Bagi Kantor Akuntan Publik

Hasil penelitian ini pertimbangan perusahaan dalam menetapkan imbalan jasa audit atas laporan keuangan yang dibayarkan kepada Kantor Akuntan Publik. Supaya jumlah imbalan yang dikeluarkan oleh perusahaan sesuai dengan beban yang dikerjakan oleh auditor. Dan diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi Kantor Akuntan Publik dalam memahami pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan *subsidiaries* terhadap *audit fee*. sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk Kantor Akuntan Publik dalam menentukan estimasi imbalan auditor kepada perusahaan.

### 3. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan maupun referensi mengenai pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *subsidiaries* terhadap *audit fee*.